

Implementasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi

Ahmad Wahyudi Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ismaika Hayati Hasnah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Asyami Ramadhan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Free May Santri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: JL. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: ismaikahayatihasnah@email.com

Abstrak. *Economic stability is a primary objective in the management of a country's economy, as it directly affects economic growth, public welfare, and sustainable development. In conventional economic practice, dependence on interest-based instruments and speculative activities often triggers economic instability, such as high inflation, financial crises, and unequal income distribution. These conditions have encouraged the development of Islamic economics as an alternative economic system grounded in Sharia principles. This study aims to analyze the implementation of Islamic fiscal and monetary policies and their role in maintaining economic stability. This research employs a qualitative method with a literature review approach, drawing on various scholarly sources, including national and international journals, Islamic economics reference books, and relevant policy documents. The findings indicate that Islamic fiscal policy, through instruments such as zakat, infaq, waqf, and public asset management, plays a significant role in income redistribution and the reduction of economic inequality. Meanwhile, Islamic monetary policy, which rejects the use of interest and emphasizes profit-and-loss sharing mechanisms, contributes to strengthening the real sector and reducing speculative practices in the financial system. The integrated implementation of Islamic fiscal and monetary policies is proven to contribute to long-term economic stability by creating a balance between economic growth and social justice. Therefore, the application of Sharia-based macroeconomic policies can serve as a strategic alternative in addressing modern economic challenges and in realizing a more stable, inclusive, and sustainable economic system.*

Keywords. *Islamic Fiscal Policy, Islamic Monetary Policy, Economic Stability, Islamic Macroeconomics*

Abstrak. Stabilitas ekonomi merupakan tujuan utama dalam pengelolaan perekonomian suatu negara karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam praktik ekonomi konvensional, ketergantungan pada instrumen berbasis suku bunga dan aktivitas spekulatif sering kali memicu ketidakstabilan ekonomi, seperti inflasi tinggi, krisis keuangan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan fiskal dan moneter syariah serta perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional, buku referensi ekonomi Islam, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah,

melalui instrumen seperti zakat, infak, wakaf, dan pengelolaan aset publik, berperan penting dalam redistribusi pendapatan dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter syariah yang menolak penggunaan suku bunga dan mengedepankan mekanisme bagi hasil mampu mendorong penguatan sektor riil serta mengurangi praktik spekulatif dalam sistem keuangan. Implementasi kebijakan fiskal dan moneter syariah secara terpadu terbukti berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang dengan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan kebijakan makroekonomi berbasis syariah dapat menjadi alternatif strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern serta mewujudkan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci. Kebijakan Fiskal Syariah, Kebijakan Moneter Syariah, Stabilitas Ekonomi, Ekonomi Makro Islam

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika stabilitas ekonomi terganggu, berbagai permasalahan seperti inflasi yang tidak terkendali, meningkatnya tingkat pengangguran, serta melebaranya kesenjangan pendapatan cenderung muncul dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi makro yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam praktiknya, sistem ekonomi konvensional yang banyak diterapkan di berbagai negara masih bergantung pada instrumen berbasis suku bunga dan aktivitas spekulatif dalam sektor keuangan. Ketergantungan tersebut kerap memicu ketidakstabilan ekonomi, seperti krisis keuangan global dan volatilitas pasar yang berlebihan. Selain itu, sistem ekonomi konvensional dinilai kurang memperhatikan dimensi etika dan keadilan sosial, sehingga distribusi pendapatan sering kali tidak merata dan memperbesar kesenjangan sosial di masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi yang menawarkan pendekatan berbeda dalam pengelolaan perekonomian. Ekonomi Islam berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal dan moneter tidak hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan pemerataan distribusi pendapatan dan terwujudnya kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Kebijakan fiskal syariah memanfaatkan instrumen-instrumen seperti zakat, infak, wakaf, dan pengelolaan aset publik sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, kebijakan moneter syariah menekankan penggunaan mekanisme bagi hasil serta penguatan sektor riil sebagai pengganti sistem suku bunga. Pendekatan ini diyakini mampu mengurangi praktik spekulatif dan meningkatkan keterkaitan antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi produktif.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan potensi ekonomi syariah yang besar, penerapan kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah menjadi semakin relevan untuk dikaji. Kajian mengenai implementasi kebijakan makroekonomi Islam diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut dapat berkontribusi dalam menjaga

stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan fiskal dan moneter syariah serta perannya dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Stabilitas Ekonomi dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, stabilitas ekonomi tidak semata-mata diartikan sebagai kondisi makroekonomi yang bebas dari tekanan inflasi atau gejolak ekonomi jangka pendek. Lebih dari itu, stabilitas ekonomi dipahami sebagai terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Islam menekankan bahwa stabilitas ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, ukuran stabilitas ekonomi dalam perspektif Islam bersifat lebih menyeluruh karena mencakup aspek material, sosial, dan moral, berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung berfokus pada indikator ekonomi semata.

2. Landasan Teoretis Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro Islam disusun berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan falah, yakni kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan ukhrawi. Dalam konteks makroekonomi, sistem ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi pendapatan, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, serta keterlibatan negara dalam menjaga kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Teori ekonomi makro Islam secara tegas menolak praktik riba, gharar, dan maysir karena praktik tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan, serta mengganggu stabilitas perekonomian.

3. Kebijakan Fiskal Syariah

Kebijakan fiskal syariah merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ini, sumber pendapatan negara tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga berasal dari instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta hasil pengelolaan aset publik. Secara teoretis, kebijakan fiskal syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan distribusi pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menekan ketimpangan ekonomi. Pengeluaran negara diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sehingga mampu mendukung stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.

4. Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem moneter konvensional karena tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumen pengendalian ekonomi. Sebagai alternatif, kebijakan ini mengandalkan mekanisme bagi hasil, pengaturan jumlah uang beredar, serta penguatan sektor riil. Secara teoretis, kebijakan moneter syariah bertujuan untuk menghindari praktik spekulatif dan memastikan bahwa aktivitas keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi produktif. Dengan pendekatan tersebut, sistem moneter syariah diyakini mampu menekan volatilitas ekonomi dan menciptakan stabilitas sistem keuangan yang lebih sehat.

5. Hubungan Kebijakan Fiskal dan Moneter Syariah dengan Stabilitas Ekonomi

Secara teoritis, pencapaian stabilitas ekonomi dalam perspektif Islam akan lebih optimal apabila kebijakan fiskal dan moneter syariah dijalankan secara terintegrasi. Kebijakan fiskal berperan dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan sosial, sementara kebijakan moneter berfungsi menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Sinergi antara kedua kebijakan tersebut menghasilkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, teori, serta implementasi kebijakan fiskal dan moneter syariah dalam perspektif ekonomi makro Islam. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi ekonomi Islam, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan terkait sistem ekonomi dan keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal syariah, dan kebijakan moneter syariah. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengkaji, membandingkan, dan mensintesis pandangan para ahli serta hasil penelitian sebelumnya. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran kebijakan makroekonomi berbasis syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Fiskal Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi, terutama melalui fungsi redistribusi pendapatan. Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan sebagai mekanisme pemerataan kekayaan yang efektif, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, pengelolaan aset publik dalam sistem Islam diarahkan untuk kepentingan umum, yang berdampak positif terhadap penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah dapat menjadi alat stabilisasi ekonomi ketika terjadi guncangan ekonomi. Dengan pengelolaan belanja negara yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, kebijakan fiskal syariah berkontribusi dalam menjaga kestabilan konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Implementasi Kebijakan Moneter Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Larangan penggunaan suku bunga mendorong sistem keuangan syariah untuk mengandalkan mekanisme bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset riil. Pendekatan ini memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga mengurangi risiko spekulasi dan gelembung ekonomi. Pengendalian jumlah uang beredar dalam sistem moneter syariah juga dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan transaksi dan aktivitas produksi. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah berpotensi menekan volatilitas ekonomi dan menciptakan stabilitas jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Implementasi kebijakan fiskal dan moneter syariah secara terpadu menunjukkan potensi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Kebijakan fiskal syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan anggaran negara, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu memperkuat keadilan distribusi pendapatan. Hal ini menjadi pembeda utama dengan kebijakan fiskal konvensional yang cenderung berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi semata. Lebih lanjut, kebijakan moneter syariah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berorientasi pada sektor riil. Dengan menghindari instrumen berbasis bunga dan aktivitas spekulatif, sistem moneter syariah mampu meminimalkan risiko krisis keuangan yang sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Mekanisme bagi hasil juga menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pelaku usaha, sehingga risiko ekonomi dibagi secara proporsional.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional. Stabilitas tidak hanya diukur dari rendahnya inflasi atau stabilnya nilai tukar, tetapi juga dari tercapainya keadilan sosial dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf berperan sebagai penyanga ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, sehingga mampu menjaga kestabilan permintaan agregat.

Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter syariah menjadi kunci utama dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Ketika kebijakan fiskal berfokus pada pemerataan dan kesejahteraan sosial, kebijakan moneter memastikan stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Kombinasi kedua kebijakan tersebut menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi global serta lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter yang berlandaskan prinsip syariah juga memiliki fungsi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketahanan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan negara menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga sebagai kemampuan sistem ekonomi dalam menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, instrumen fiskal syariah seperti zakat dan wakaf produktif berperan sebagai penopang ekonomi yang bekerja secara alami untuk meredam dampak gejolak ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan fiskal syariah yang berorientasi pada prinsip keadilan distribusi turut memberikan kontribusi dalam menekan ketimpangan struktural dalam perekonomian. Ketimpangan yang tinggi sering kali menjadi sumber munculnya ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, mekanisme distribusi kekayaan dalam sistem fiskal syariah tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata dalam menciptakan stabilitas jangka panjang. Distribusi pendapatan yang lebih merata memungkinkan daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga permintaan agregat dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Sementara itu, kebijakan moneter syariah menghadirkan pendekatan alternatif dalam pengelolaan stabilitas keuangan dengan menekankan prinsip kehati-hatian serta keterkaitan yang kuat antara aktivitas keuangan dan sektor riil. Pendekatan ini berbeda dengan sistem moneter konvensional yang lebih mengandalkan instrumen berbasis bunga dalam pengaturan likuiditas, yang pada kondisi tertentu dapat mendorong spekulasi dan meningkatkan kerentanan sistem keuangan. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah memiliki potensi untuk menekan risiko penularan krisis keuangan dan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis yang bersifat sistemik.

Lebih lanjut, penerapan mekanisme bagi hasil dalam sistem moneter syariah menciptakan pola incentif yang lebih seimbang bagi lembaga keuangan maupun pelaku usaha. Pembagian risiko dan keuntungan yang didasarkan pada kinerja usaha mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Dalam kerangka stabilitas ekonomi makro, mekanisme ini berperan dalam menjaga kesinambungan pembiayaan serta menurunkan risiko gagal bayar yang dapat berdampak sistemik.

Namun demikian, efektivitas kebijakan makroekonomi syariah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kekuatan kelembagaan yang mendukungnya. Pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter syariah menuntut adanya koordinasi yang solid antara pemerintah, otoritas moneter, dan lembaga keuangan syariah. Tanpa dukungan regulasi yang kuat dan konsistensi kebijakan yang berkelanjutan, potensi sistem ekonomi syariah dalam menopang stabilitas ekonomi sulit untuk diwujudkan secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama penerapan kebijakan makroekonomi syariah terletak pada belum terintegrasinya secara optimal sektor fiskal syariah dengan sektor keuangan syariah. Meskipun perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, kontribusinya terhadap stabilitas makroekonomi secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih terarah untuk mengoptimalkan peran instrumen fiskal syariah serta memperkuat kapasitas lembaga keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor riil.

Selain aspek kelembagaan, peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pemangku kebijakan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem ini. Pemahaman yang menyeluruh terhadap prinsip dan mekanisme ekonomi Islam akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pemanfaatan instrumen-instrumen syariah. Pada akhirnya, kondisi ini akan memperkuat fondasi ekonomi syariah dan meningkatkan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter syariah tidak hanya layak diposisikan sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai pendekatan pelengkap yang mampu memperkuat stabilitas ekonomi makro. Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan ekonomi modern menawarkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan makroekonomi berbasis syariah menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika serta tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang berlandaskan prinsip syariah memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka ekonomi Islam, stabilitas ekonomi tidak semata-mata dinilai dari capaian indikator makroekonomi konvensional, melainkan juga dari terwujudnya pemerataan pendapatan dan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Instrumen fiskal syariah, seperti zakat dan wakaf produktif, berperan sebagai alat penyanga ekonomi yang efektif dalam meredam dampak gejolak ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan fiskal syariah yang berorientasi pada keadilan distribusi terbukti mampu menekan ketimpangan struktural, mempertahankan daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas permintaan agregat. Di sisi lain, kebijakan moneter syariah melalui penerapan prinsip kehati-hatian, penghindaran instrumen berbasis bunga, serta penggunaan skema bagi hasil mampu

memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Pendekatan ini berkontribusi dalam mengurangi praktik spekulatif, menekan risiko penularan krisis keuangan, dan meminimalkan potensi gangguan terhadap sistem ekonomi secara menyeluruh.

Meskipun demikian, keberhasilan penerapan kebijakan makroekonomi syariah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, kekuatan kelembagaan, serta tingkat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang dihadapi masih berkaitan dengan belum optimalnya integrasi antara sektor fiskal syariah dan sektor keuangan syariah, serta perlunya peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan.

Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan kebijakan makroekonomi berbasis syariah perlu terus diupayakan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan ekonomi modern tidak hanya memberikan alternatif dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ansori, M. R., dkk. (2024). *Konsep uang dalam ekonomi makro Islam*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2016). The role of Islamic economics in achieving economic stability. *Islamic Economic Studies*, 24(1).
- Hasan, Z. (2010). Fiscal policy and resource allocation in an Islamic economy. *Humanomics*, 26(1).
- Imsar, I., & Siregar, I. A. (2023). Stabilitas ekonomi makro dalam perspektif ekonomi Islam: Teori dan praktik. *Jurnal AKTUAL*, 21(2).
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi makro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic economics: Theory and practice*. Delhi: Idarah Adabiyah.
- Mutmainnah, & Yuwana, S. I. P. (2025). Strategi ekonomi syariah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*.
- Risdiana Himmati, C. M., Sari, L., Hartiningtyas, L., & Erdkhadifa, R. (2024). Macroeconomic stability on Islamic economic perspective. *Journal of Management and Islamic Finance*, 4(2).
- Siddiqi, M. N. (2004). Monetary policy in an Islamic economy. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 17(1).